

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM Mendukung Sustainable Development's Goal

Khaidir Fadil¹; Suhendra²; Amran³

Universitas Ibn Khaldun Bogor

khaidir.fadil@uika-bogor.ac.id , dr.suhendra.mm@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine education policies that support quality education SDGs in several ASEAN countries, especially Indonesia. The method used is library research by taking references from books, websites, and international journals. Sustainable Development Goals or commonly abbreviated SDGs are sustainable development goals resulting from the UN Summit in 2012. One of the 17 resulting goals is regarding quality education. Several ASEAN countries such as Singapore, Malaysia, Brunei Darussalam, and Indonesia have demonstrated that education policies have been issued to support quality education SDGs. In Singapore, it is proven by ensuring that all children of Singapore Citizens over the age of six must be enrolled in a national primary school. The six-year primary school education, which is heavily subsidized, aims to provide Singaporean children with a general core of knowledge that serves as a solid foundation for further education and training. While it is proven by the policies and priorities of education in Malaysia which are systematically related to the national development plan. As such, the ministry of education is committed to providing education and training services in line with the main thrust of the National Line Perspective Plan and the 5-Year Development Plan. Then, in Brunei Darussalam, it was proven that Through the '2018-2022 Strategic Plan', the ministry of education has set its mission to provide holistic education to achieve maximum potential for all in line with its vision of 'Quality Education, Dynamic Nation'. Whereas in Indonesia the implementation of quality education policies in support of the SDGs can be seen based on reports of regional action plans, one of which is West Java and East Java, namely: Increasing lifelong learning opportunities for all people free of charge, equal and quality which leads to the achievement of effective and relevant learning, while basic services are of high quality. Namely free quality education and health Tis-Tas (Free and Quality)

Keywords : Policy; Education; Sustainable Development Goal's

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pendidikan yang mendukung SDGs pendidikan berkualitas di beberapa negara ASEAN khususnya Indonesia Metode yang digunakan yaitu library research dengan mengambil referensi dari buku, website, dan jurnal internasional. Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan dari KTT PBB pada tahun 2012. Salah satu dari 17 tujuan yang dihasilkan yaitu mengenai pendidikan berkualitas. Beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia telah menunjukkan adanya kebijakan pendidikan yang diterbitkan untuk mendukung SDGs pendidikan berkualitas. Di singapura

dibuktikan dengan memastikan bahwa semua anak Warga Negara Singapura yang berusia di atas enam tahun harus terdaftar di sekolah dasar nasional. Pendidikan sekolah dasar enam tahun, yang disubsidi secara besar-besaran, bertujuan untuk memberikan anak-anak Singapura inti pengetahuan umum itu berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk pendidikan lebih lanjut dan pelatihan. Sementara di Malaysia dibuktikan dengan Kebijakan dan prioritas pendidikan di Malaysia secara sistematis terkait dengan rencana pembangunan nasional. Dengan demikian, kementerian pendidikan berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan dorongan utama dalam Rencana Perspektif Garis Nasional dan Rencana Pembangunan 5 Tahun. Kemudian, di Brunei Darussalam dibuktikan Melalui 'Rencana Strategis 2018-2022', kementerian pendidikan telah menetapkan misinya untuk memberikan pendidikan holistik untuk mencapai potensi maksimal untuk semua sejalan dengan visinya 'Pendidikan Berkualitas, Bangsa Dinamis'. Sedangkan di Indonesia penerapan kebijakan Pendidikan berkualitas dalam mendukung SDGs yaitu bisa dilihat berdasarkan laporan rencana aksi daerah salah satunya yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur yaitu diantaranya: Meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua kalangan tanpa di pungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada pencapaian pembelajaran yang efektif dan relevan. sementara Pelayanan Dasar berkualitas. Yaitu pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas)

Kata Kunci : Kebijakan; Pendidikan; SDGs

PENDAHULUAN

Pendidikan ialah hal yang vital untuk manusia dan kehidupannya. Sejak kecil hingga dewasa, manusia dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dalam hal mutu kurikulum, tenaga pengajar yang berkualitas, serta sarana, prasarana yang memadai. Mereka memiliki hak untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya. Dalam pandangan masyarakat dunia, pendidikan berperan penting dalam membangun negara yang besar dan terhormat (Pradnyana, 2022). Tentu saja, negara dapat mendidik negara atau rakyatnya agar memiliki kualitas dan daya saing melalui penyelenggaraan pendidikan yang unggul. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa inilah tujuan yang ingin dicapai oleh negara (Sukardi et al., 2022)

Urgensi mengenai pendidikan yang bermutu semakin banyak disadari, karena adanya sumber daya manusia yang bermutu dan perkembangan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri bergantung pada peningkatan efektif pendidikan di masyarakat. Akan tetapi, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di negara Indonesia berada cukup jauh di belakang negara-negara ASEAN dan negara maju. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tetap menjadi kendala signifikan bagi pertumbuhan dan daya saing bangsa. Hal ini berkontribusi pada buruknya daya saing global Indonesia. Di sisi lain, sebagai akibat dari

percepatan globalisasi dan terbukanya pasar global, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang makin luas serta kompetitif (Maki et al., 2022).

Di negara berkembang layaknya di Indonesia, kebijakan pendidikan terus menghadapi kendala seperti keadilan, kualitas hasil pembelajaran secara keseluruhan dan sekolah dan lingkungan belajar, atau kemampuan sistem untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan, pendanaan, tata kelola yang tidak efektif, atau system asesmen. Padahal, hendaknya kebijakan pendidikan harus dapat mengacu pada semua program yang berdampak pada sistem pendidikan, dimulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi (Qadir Muslim et al., n.d.)

Merujuk pada Bell & Stevenson, (2006) kebijakan pendidikan termasuk dalam prioritas pemerintah global. Kebijakan pendidikan adalah seperangkat undang-undang atau peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan pada suatu lembaga pendidikan sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud. Kebijakan pendidikan memiliki dua tujuan: sebagai sumber pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban standar budaya yang menurut pemerintah harus dijunjung tinggi dalam pendidikan, dan sebagai metode untuk mengukur kinerja siswa dan pengajar. Viennet and Pont, (2017) menggambarkan kebijakan pendidikan sebagai program yang dihasilkan oleh otoritas publik, dipandu oleh nilai dan ide, ditujukan untuk pelaku pendidikan, dan dieksekusi oleh administrator dan professional pendidikan (Qadir Muslim et al., n.d.)

Berbagai kebijakan pendidikan telah dibuat dalam upaya membantu penyelenggara pendidikan dan masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pengembangan pendidikan yang diiringi inovasi (Junaid, 2016). Tercapainya tujuan pendidikan bergantung pada beberapa unsur yang saling berhubungan, antara lain faktor pengajar, siswa, tujuan Pendidikan, peralatan Pendidikan, hingga lingkungan (Dewi, 2016). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang tersusun dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan. Jika salah satu subsistem mengalami kesulitan sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal dalam mencapai tujuan pendidikan, maka sistem tersebut tidak akan berjalan.

Sistem pendidikan nasional memiliki tujuan pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem yang menyatukan seluruh satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional (Hakim, 2016). Tujuan pendidikan nasional tersebut ditetapkan melalui kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan Indonesia telah mengalami beberapa kali revisi dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang representatif bagi penduduk Indonesia. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disahkan pada tahun 2003. Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kebijakan pendidikan

Tercapainya tujuan pendidikan berdampak pada kualitas pendidikan (azhari, 2016). Mutu pendidikan dapat diatur sesuai dengan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan pendidikan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Sebagai pihak yang menyelenggarakan pendidikan, pemerintah harus menetapkan kebijakan pendidikan yang proaktif dan mampu memecahkan masalah guna mengatasi hambatan pencapaian tujuan pendidikan (Elwijaya et al., 2021)

Sistem pendidikan ialah suatu sistem yang kompleks serta memiliki keterkaitan antar unsurnya. Sehingga, pemahaman akan kebijakan Pendidikan yang relevan dengan sistem Pendidikan nasional Indonesia amat dibutuhkan.

Ide SDGs (*Sustainable Development Goals*) berasal dari deskripsi yang diberikan oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland dalam laporan tahun 1987 yang diterjemahkan menjadi "Masa Depan Kita Bersama," yang membahas masalah pengembangan masyarakat dalam kaitannya dengan sumber daya yang terbatas dan alokasinya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk KTT Rio 1992 dan KTT Milenium 2000, tetapi tetap tidak terpecahkan. Namun, selama KTT Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB 2012 yang diadakan di Rio, PBB mengambil inisiatif untuk menetapkan 17 tujuan SDGs, yang diratifikasi pada tahun 2015 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016, dengan maksud untuk mencapainya dalam waktu lima belas tahun. Peta jalan ini disebut sebagai Agenda 2030, dan terdiri dari 128 target (Otero & Torres, 2018) Tujuh belas tujuan global SDG meliputi: 1) menghentikan segala bentuk kemiskinan di manapun; 2) menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan; 3) menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk segala usia; 4) menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5) memperoleh kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6) menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang

berkelanjutan untuk semua; 7) memastikan ketersediaan dan pengelolaan air yang berkelanjutan dan 8) mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua; 10) meminimalisasi ketimpangan di dalam dan antar negara; 11) membuat kota dan permukiman menjadi lingkungan yang aman dan mengayomi dengan adanya inklusi; 12) mendorong sistem konsumsi dan produksi yang bertahan lama; 13) bertindak segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14) mengoptimalkan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan; 15) mengupayakan perlindungan dan pengamanan serta promosi pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan, mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; dan 16) mengoptimalkan upaya promosi masyarakat yang sejahtera dan hidup dalam kedamaian, dengan sikap tanggung jawab, serta 17) mengoptimalkan upaya eksekusi serta revitalisasi kerjasama global (Bolton, 2021)

METODE

Studi ini ialah studi kualitatif. Studi kualitatif dilakukan untuk untuk mempelajari fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, melalui penggunaan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam tertentu, dan dengan penerapan metode alami (Trianto, 2011)

Studi ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu studi untuk menjawab suatu masalah yang terutama bergantung pada penyelidikan yang kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Tinjauan semacam ini sering dilakukan dengan cara baru atau untuk alasan baru. Pada kasus ini, bahan pustaka berfungsi sebagai sumber ide untuk mengeksplorasi pemikiran atau konsep baru, sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dari informasi yang ada sehingga kerangka teori baru dapat dibentuk, atau sebagai landasan untuk memecahkan masalah (Efendi, 2016)

Studi ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, antara lain perpustakaan dan lokasi lainnya. Literatur tidak hanya mencakup buku, tetapi juga dokumentasi, surat kabar, majalah, dan jenis bahan tertulis lainnya. Literatur berisi berbagai teori, aturan, pernyataan, prinsip, pandangan, dan konsep. Yang dapat digunakan untuk memeriksa dan memecahkan masalah yang diselidiki. Studi ini biasanya disebut sebagai

penelitian dokumentasi atau survei/penelitian buku karena sumber data tersebut (Nawawi, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Sustainable Development Goals

Konsepsi awal Sustainable Development Goals dapat ditelusuri kembali ke laporan tahun 1987 yang jika diterjemahkan berjudul "Masa Depan Kita Bersama" yang ditulis oleh perdana menteri Norwegia Harlem Brundtland. Ia menyoroti bahwasanya kesulitan pembangunan di masyarakat adalah distribusi dan kelangkaan sumber daya manusia. Tujuan SDGs adalah program tindak lanjut dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah disepakati beberapa negara anggota PBB pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB bersama pemerintah, meratifikasi SDG sebagai kesepakatan untuk pembangunan global. Dengan topik "Mengubah Dunia Kita: Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030" (Panuluh Meila Riskia Fitri, 2015)

Konsepsi awal Sustainable Development Goals dapat ditelusuri kembali ke laporan tahun 1987 yang jika diterjemahkan berjudul "Masa Depan Kita Bersama" yang ditulis oleh perdana menteri Norwegia Harlem Brundtland. Ia menyoroti bahwasanya kesulitan pembangunan di masyarakat adalah distribusi dan kelangkaan sumber daya manusia. Tujuan SDGs adalah program tindak lanjut dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah disepakati beberapa negara anggota PBB pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB bersama pemerintah, meratifikasi SDG sebagai kesepakatan untuk pembangunan global. Dengan topik "Mengubah Dunia Kita: Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030".

MDGs bertanggung jawab untuk mencapai tujuan besar bagi pembangunan baik di negara maju maupun negara berkembang. Dalam bidang pendidikan, MDGs berupaya menjamin semua anak mendapatkan pendidikan dasar, dengan 94,7% dari tujuan terpenuhi untuk anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Merujuk pada (Salam et al., 2022), SDGs menggantikan program MDGs yang berakhir pada tahun 2015, sehingga pencapaian MDGs terus meningkat.

Program SDGs memiliki 17 tujuan, antara lain (1) menumpas kemiskinan di mana-mana, (2) menumpas kelaparan dan memenuhi kebutuhan pangan dengan meningkatkan sumber gizi, (3) memastikan kehidupan sejahtera untuk segala usia, (4) Mutu Pendidikan, kesempatan belajar yang adil serta seumur hidup untuk semua umur, (5) kesetaraan gender,

(6) memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dan (7) mengoptimalkan penyediaan akses yang terjangkau dan modern untuk semua. (8) mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, lapangan kerja produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua orang, (9) inovasi industri dan infrastruktur, (10) meminimalisasi ketimpangan dalam negara, dan (11) membuat kota dan pemukiman manusia aman dan ramah. (12) konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, (13) menghadapi masalah perubahan iklim dan dampaknya, (14) melestarikan perairan (laut), (15) mengoptimalkan pemulihan serta keamanan ekosistem serta pengelolaan hutan, membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya beberapa keragaman, (16) penyediaan akses keabadian untuk semua, (17) upaya revitalisasi kerjasama global dan memperkuat upaya implementasinya, serta 169 target, adalah tujuan dari program gerakan global selama 15 tahun ke depan sejak tahun 2016 sampai 2030 dalam rangka mengentas kemiskinan, melakukan perlindungan atas lingkungan, mengoptimalkan mutu Pendidikan, serta meminimalisasi ketimpangan.

Sesuai dengan argumen Annur et al. (2018), SDGs ialah lebih inklusif karena program ini berlaku secara global, sehingga membebankan kewajiban moral kepada semua negara untuk mencapai tujuan dan sasaran SDGs tersebut. Sebagai kelanjutan dari MDGs, SDGs bertujuan untuk mengatasi masalah pembangunan secara efektif. SDGs mencakup semua negara maju, berkembang, dan kurang berkembang. SDGs adalah program yang dirancang untuk menopang peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang Pendidikan. Pendidikan dapat berdampak pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai landasan untuk memajukan tujuan dan sasaran SDGs. Peningkatan pendidikan di Indonesia akan memudahkan tercapainya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diantaranya ialah upaya mewujudkan bangsa yang berkualitas dengan adanya pendidikan yang bermutu dan tepat guna.

Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung SDGs Singapura

Filosofi singapura terhadap pendidikan adalah didasarkan pada keyakinan bahwa kekayaan suatu bangsa terletak pada orang-orangnya. Pertumbuhan dan perkembangan masa depan kita tergantung pada pembaharuan dan regenerasi terus menerus warga negara, membangun di atas masa lalu, belajar dari saat ini, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Sistem pendidikan Singapura ditujukan untuk menyediakan setiap

anak dengan dasar yang kuat di mana mereka bisa membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sepanjang hidup. Untuk ini Pada akhirnya, ini menekankan pendidikan berbasis luas dan holistik, bilingualisme, guru terlatih, dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu sedang belajar. Pemerintah Singapura telah menciptakan lanskap pendidikan yang beraneka ragam dengan jalur yang beragam sehingga siswa memiliki akses ke kesempatan belajar yang memenuhi minat yang berbeda, kekuatan, dan kebutuhan belajar. Sekolah kami juga bekerja dekat dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lebih kaya lingkungan belajar dan hasil pendidikan yang lebih baik. Kami juga menyadari bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup, terutama dalam ekonomi global yang tunduk pada cepat perubahan dan gangguan. Inilah mengapa kami mendorong dan mendukung warga Singapura untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di semua tahap kehidupan

Pendidikan Berkualitas, Terjangkau, dan Dapat Diakses untuk Semua Undang-Undang Wajib Belajar, yang berlaku sejak tahun 2003, memastikan bahwa semua anak Warga Negara Singapura yang berusia di atas enam tahun harus terdaftar di sekolah dasar nasional hingga Sekolah Dasar Enam. Itu pendidikan sekolah dasar enam tahun, yang disubsidi secara besar-besaran, bertujuan untuk memberikan anak-anak kita inti pengetahuan umum itu berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk pendidikan lebih lanjut dan pelatihan.

Untuk memberikan awal yang kuat bagi setiap anak, kami telah meningkatkannya kualitas pendidikan prasekolah melalui beberapa skema. Termasuk mendirikan Kementerian Pendidikan (MOE) Taman Kanak-Kanak dan mengembangkan Pengasuhan Dini Kurikulum Peserta Didik (NEL). Kurikulum NEL menyediakan rangkaian lengkap sumber daya yang ditargetkan pada empat hingga enam tahun. Ini juga bertindak sebagai panduan pedagogis untuk prasekolah pendidik untuk memahami bagaimana anak-anak belajar dan merancang kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan unik anak-anak, kemampuan, dan gaya belajar.

Aspek mendasar dari sistem pendidikan Singapura adalah penekanan pada peningkatan keterampilan. Diluncurkan di 2014, SkillsFuture adalah gerakan nasional yang bertujuan untuk mempromosikan dukungan industri bagi individu untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk maju dalam karir mereka serta asuh budaya belajar sepanjang hayat. Ini penting bagi individu untuk tetap kompetitif dalam ekonomi digital, di mana industri semakin terganggu oleh teknologi baru dan aplikasi digital, dan bersiap untuk

muncul peluang di sektor pertumbuhan seperti kesehatan, perkotaan solusi, manufaktur maju, hub dan professional jasa.

Kami memperkuat kemitraan antara institusi pendidikan dan industri untuk mengembangkan lebih banyak lagi pilihan pembelajaran yang relevan dengan industri dan menyediakan paparan lingkungan kerja nyata. Dengan demikian, industry pemain menjadi co-developer modal manusia dan bakat untuk industri masing-masing, sementara individu mampu untuk memperdalam keterampilan teknologi dan domain khusus mereka. Melalui perolehan terus-menerus keterampilan yang relevan dengan industry dan pengalaman, warga Singapura akan diperlengkapi untuk tinggal relevan dalam lanskap ekonomi yang berkembang pesat. Sangat penting bagi siswa kami untuk mengembangkan "soft skill" sebagai bagian dari proses pendidikan mereka. Untuk tujuan ini, Karakter kita dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKK) bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pada anak-anak kita sehingga mereka menjadi berwawasan sipil dan individu dan warga negara yang bertanggung jawab. CCE menekankan keterkaitan nilai-nilai, sosial dan emosional kompetensi, literasi kewarganegaraan, kesadaran global, dan keterampilan lintas budaya yang sangat penting untuk pembentukan karakter. Hasil pembelajaran CCE juga selaras dengan SDGs. Anak-anak diajari untuk menghargai sosial budaya Singapura keragaman, peduli terhadap sesama, berkontribusi pada kemajuan kita bermasyarakat dan berbangsa, serta menjadi warga negara yang aktif dalam dunia yang terglobalisasi. (*A SUSTAINABLE AND RESILIENT SINGAPORE TOWARDS Singapore's Voluntary National Review Report to the 2018 UN High-Level Political Forum on Sustainable Development*, 2018)

Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung SDGs Malaysia

Kebijakan dan prioritas pendidikan di Malaysia secara sistematis terkait dengan rencana pembangunan nasional. Dengan demikian, MOE berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan dorongan utama dalam Rencana Perspektif Garis Nasional dan Rencana Pembangunan 5 Tahun. Berkenaan dengan SDGs, memandang bahwa memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka, merupakan salah satu strategi efektif dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, banyak upaya diarahkan pada penguatan program yang ada, melengkapi sekolah dengan fasilitas teknologi yang lebih

baik, dan menyediakan kurikulum yang sesuai yang mungkin diperlukan untuk masa depan yang berkelanjutan.

Komitmen konsisten Malaysia terhadap ESD terbukti dalam cetak biru pendidikan. Dalam Rencana Pengembangan Pendidikan 2000-2010 yang menargetkan penyediaan pendidikan berkualitas kelas dunia, misalnya, fokusnya adalah pada tujuan, isu, dan strategi untuk pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar; pelajaran kedua; pendidikan Tinggi; program pendukung; pembiayaan pendidikan; manajemen pendidikan dan TIK dalam pendidikan. Dalam Cetak Biru Pendidikan Malaysia (Prasekolah hingga Sekolah Menengah) 2013-2025, strategi yang lebih ketat untuk menyediakan pendidikan yang setara dan berkualitas untuk semua telah ditetapkan. Pelaksanaan rencana dibagi menjadi tiga gelombang - Gelombang 1 (2013-2015): Mendukung guru dan berfokus pada keterampilan inti; Gelombang 2 (2016-2020): Mempercepat perbaikan sistem; dan Gelombang 3 (2021-2025): Menuju keunggulan dengan peningkatan fleksibilitas operasional. Lima aspirasi untuk sistem pendidikan diakses dari tingkat prasekolah hingga menengah (tingkat partisipasi 100% di semua tingkatan); kualitas (Sepertiga negara teratas dalam penilaian internasional); pemerataan (pengurangan 50% dalam kesenjangan pencapaian - perkotaan-pedesaan, sosial-ekonomi, gender); kesatuan (Sistem pendidikan yang memberi anak nilai dan pengalaman bersama dengan merangkul keragaman); dan efisiensi (Sistem yang memaksimalkan hasil siswa dalam anggaran saat ini) Cetak Biru Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025 memiliki aspirasi yang sama dengan pendidikan prasekolah hingga menengah, yaitu akses, kualitas, pemerataan, kesatuan, dan efisiensi. Sistem pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi berbagi visi tentang bagaimana seharusnya hasil pendidikan Malaysia, dan apa artinya bagi masing-masing siswa.

Kementerian menekankan keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan (ilmu) serta etika dan moralitas (akhlak). Aspirasi mahasiswa dalam MEB dibangun di sekitar enam atribut utama: etika dan spiritualitas, keterampilan kepemimpinan, identitas nasional, kemahiran berbahasa, keterampilan berpikir, dan pengetahuan. Ini adalah enam atribut yang sama untuk siswa yang menjadi landasan sistem pendidikan tinggi. Transformasi dalam pendidikan tinggi didorong oleh 10 Dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun Malaysia ke- 11 saat ini , 17 target SDG dipetakan dengan proyek atau inisiatif pembangunan tertentu. Tujuan 4 'memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua' dipetakan dengan dorongan strategis 3, Cetak Biru Pendidikan 2013-2025 (Prasekolah hingga Sekolah

Menengah), Cetak Biru Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi 2015-2025), Strategi Nasional Pendidikan Tinggi Rencana dan Cetak Biru Enkulturasi Pembelajaran Sepanjang Hayat 2011-2020 (Mokshein, 2019)

Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung SDGs Brunei Darussalam

Sebagai negara kecil dengan populasi kurang dari setengah juta jiwa, pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan Brunei Darussalam. Melalui 'Rencana Strategis 2018-2022', MOE telah menetapkan misinya untuk memberikan pendidikan holistik untuk mencapai potensi maksimal untuk semua sejalan dengan visinya 'Pendidikan Berkualitas, Bangsa Dinamis'. Sistem pendidikan di negara ini bertujuan untuk mengasuh setiap anak, dan membantu siswa menemukan dan memaksimalkan bakat mereka, serta mengembangkan semangat untuk belajar sepanjang hayat. Negara ini selalu memprioritaskan akses pendidikan universal bagi warganya, dengan menekankan pada pemerataan dan kesetaraan untuk semua. Ini mengakui kebutuhan penting untuk pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga kerja yang terdidik dan dapat dipasarkan, di mana ia telah membuat kemajuan yang signifikan

Dalam memastikan akses inklusif dan setara ke pendidikan berkualitas, semua anak diberikan pendidikan dasar gratis dan wajib. Pada tahun 2009, KLH mencanangkan sistem pendidikan baru yaitu Sistem Pendidikan Nasional Abad 21 (SPN21) yang menerapkan beberapa perubahan sistem pendidikan, yaitu struktur pendidikan, kurikulum dan penilaian serta teknis pendidikan. SPN21 memungkinkan siswa berkemampuan tinggi untuk menyelesaikan pendidikan menengah mereka dalam empat tahun, bukan lima tahun. Ini melayani kebutuhan siswa, dengan menyediakan berbagai jalur bagi siswa untuk memilih program yang sesuai dengan kemampuan, minat, kecenderungan, pertumbuhan dan perkembangan mereka. Brunei Darussalam menerapkan kebijakan memberikan pendidikan 12 tahun kepada semua anak. Ini terdiri dari satu tahun pendidikan pra sekolah, enam tahun pendidikan dasar, tiga tahun pendidikan menengah pertama dan dua tahun pendidikan menengah atas atau kejuruan dan teknik. Sejak 2014, MOE telah meningkatkan pendidikan orang tua melalui '*Program School and Family Engagement (SAFE)*' di semua pra-sekolah, yang memungkinkan orang tua untuk terlibat secara mendalam dalam pengembangan literasi anak-anak mereka.

Brunei Darussalam juga memperkenalkan Program Relawan Guru Asisten untuk memungkinkan sukarelawan ditempatkan di sekolah untuk membantu guru pra-sekolah untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses pendidikan anak usia dini yang berkualitas dengan lebih baik. Untuk memastikan pendidikan inklusif yang berkualitas bagi semua, siswa berkebutuhan khusus diberikan program pendidikan khusus, baik di sekolah negeri utama maupun menengah. Saat ini jumlah siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut mencapai sekitar 2.014 siswa.

Brunei Darussalam juga berpartisipasi dalam *Program Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* untuk *International Student Assessment (PISA)* untuk pertama kalinya pada tahun 2018 untuk mengukur kemampuan siswanya dalam Membaca, Matematika, dan Sains, membandingkannya dengan 79 negara lain dan ekonomi. Di antara Negara Anggota ASEAN yang berpartisipasi, Brunei Darussalam menduduki peringkat ke-3 di semua domain PISA 2018. Hasil keseluruhan menempatkan Brunei Darussalam di peringkat ke-60 untuk Modifikasi dan/atau adaptasi dilakukan terhadap kurikulum, serta dalam strategi belajar-mengajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan para siswa ini, sehingga mereka dapat mencapai potensi mereka secara maksimal.

Brunei Darussalam menawarkan berbagai program alternatif bagi siswa pasca sekolah menengah untuk memenuhi kekuatan dan minat mereka. Universitas lokalnya, UBD, UTB, dan UNISSA, menawarkan banyak program sarjana dan pascasarjana. Sebagai cerminan dari kemajuan dan perkembangannya, baik UBD maupun UTB merupakan perguruan tinggi muda yang baru-baru ini menduduki peringkat tinggi dalam QS World University Rankings dan QS Asian University Rankings Brunei Darussalam telah mengambil beberapa inisiatif untuk memastikan bahwa kualitas dan standar pengajaran dapat ditingkatkan dan ditingkatkan. MOE telah memperkenalkan Standar Guru Brunei, yang merupakan seperangkat kompetensi pengajaran yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengajaran, untuk meningkatkan pencapaian semua siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Brunei Darussalam.

Untuk mengevaluasi kemajuannya dalam memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, Penilaian Kinerja Guru diterapkan sebagai deskriptor kinerja untuk kompetensi pengajaran, dengan SAT digunakan untuk mengukur pencapaian dan pembelajaran siswa dalam literasi dan numerasi. persyaratan minimum untuk memenuhi syarat untuk beasiswa. Pada tahun 2018, Skema Beasiswa Pendidikan Teknik dan Kejuruan diperkenalkan untuk memberikan kesempatan akademik tambahan kepada lulusan sekolah

dengan level 3 'O' ke bawah untuk melanjutkan studi mereka. Laporan Voluntary National Review Brunei Darussalam pada Forum Politik Tingkat Tinggi PBB MOE baru saja mendirikan MENINGKATKAN KUALITAS GURU Brunei Darussalam telah mengambil beberapa inisiatif untuk memastikan bahwa kualitas dan standar pengajaran dapat ditingkatkan dan ditingkatkan.

MOE telah memperkenalkan Standar Guru Brunei, yang merupakan seperangkat kompetensi pengajaran yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengajaran, untuk meningkatkan pencapaian semua siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Brunei Darussalam. Departemen Manajemen Pendidik untuk memastikan Kementerian menyediakan sumber daya manusia (guru, kepala sekolah dan spesialis) yang sangat terampil dan sukses melalui manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan kuat yang berfokus pada empat domain: Pengembangan dan penerapan proses seleksi dan rekrutmen guru yang ketat dan komprehensif; ii) Pengerahan dan penempatan kembali guru dan pimpinan sekolah secara strategis sesuai kebutuhan dan prioritas; iii) Jalur peningkatan karir untuk guru dan pemimpin sekolah; dan iv) Proyeksi perencanaan suksesi dan penyediaan program pra pensiun bagi pendidik yang akan pensiun. (Brunei Hand et al., n.d.)

Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung SDGs Indonesia

Kebijakan penerapan SDGS di Indonesia dalam bidang Pendidikan demi terwujudnya Pendidikan yang berkualitas salah satu bisa di lihat dari provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Berdasarkan laporan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam rangka mendukung tercapainya SDGs telah disusun oleh pemerintah daerah Jawa Barat beberapa target diantaranya: 1). Meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua kalangan tanpa di pungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada pencapaian pembelajaran yang efektif dan relevan. 2). Untuk mencapai pendidikan berkualitas di Jawa Barat pada Tahun 2030 ditargetkan menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 3). Kemampuan literasi dan numerasi masih menjadi masalah di negara yang sedang berkembang, sehingga pada Tahun 2030 ditargetkan untuk menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki

kemampuan literasi dan numerasi. 4). Untuk mencapai pendidikan berkualitas di Jawa Barat pada Tahun 2030 ditargetkan menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. 5). Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan proses pengembangan diri guru secara terus menerus untuk membangun kualitas pembelajaran yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) guru yang telah memiliki sertifikat lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang tidak memiliki sertifikat, baik guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), maupun Guru Honor Daerah (Honda). (*RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT*, n.d.)

Sementara Berdasarkan laporan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam rangka mendukung tercapainya SDGs telah disusun oleh pemerintah daerah Jawa Timur beberapa target diantaranya: 1). Pelayanan Dasar berkualitas. Yaitu pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK, SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata). Penguatan BOSDA MADIN, bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah. Memberikan akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak yatim dan anak yatim piatu yang kurang mampu. (Gubernur & Timur, n.d.)

KESIMPULAN

Penerapan SDGs pendidikan berkualitas di berbagai negara dapat dilihat melalui kebijakan pendidikannya. Di Singapura dibuktikan dengan memastikan bahwa semua anak Warga Negara Singapura yang berusia di atas enam tahun harus terdaftar di sekolah dasar nasional. Pendidikan sekolah dasar enam tahun, yang disubsidi secara besar-besaran, bertujuan untuk memberikan anak-anak Singapura inti pengetahuan umum itu berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk pendidikan lebih lanjut dan pelatihan. Diluncurkan di 2014, SkillsFuture adalah gerakan nasional yang bertujuan untuk mempromosikan dukungan industri bagi individu untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk maju dalam karir mereka serta asuh budaya belajar sepanjang hayat.

Sementara di Malaysia dibuktikan dengan Kebijakan dan prioritas pendidikan di Malaysia secara sistematis terkait dengan rencana pembangunan nasional. Dengan demikian, kementerian pendidikan berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan dorongan utama dalam Rencana Perspektif Garis Nasional dan Rencana Pembangunan 5 Tahun. Pemerintah Malaysia memandang bahwa memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka, merupakan salah satu strategi efektif dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Komitmen konsisten Malaysia terhadap SDGS terbukti dalam cetak biru pendidikan.

Kemudian, di brunei Darussalam dibuktikan Sebagai negara kecil dengan populasi kurang dari setengah juta jiwa, pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan Brunei Darussalam. Melalui 'Rencana Strategis 2018-2022', kementerian pendidikan telah menetapkan misinya untuk memberikan pendidikan holistik untuk mencapai potensi maksimal untuk semua sejalan dengan visinya 'Pendidikan Berkualitas, Bangsa Dinamis'. Sistem pendidikan di negara ini bertujuan untuk mengasuh setiap anak, dan membantu siswa menemukan dan memaksimalkan bakat mereka, serta mengembangkan semangat untuk belajar sepanjang hayat. Brunei Darussalam juga memperkenalkan Program Relawan Guru Asisten untuk memungkinkan sukarelawan ditempatkan di sekolah untuk membantu guru pra-sekolah untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses pendidikan anak usia dini yang berkualitas dengan lebih baik. MOE telah meningkatkan pendidikan orang tua melalui 'Program School and Family Engagement (SAFE)' di semua pra-sekolah, yang memungkinkan orang tua untuk terlibat secara mendalam dalam pengembangan literasi anak-anak mereka.

Sedangkan di Indonesia penerapan kebijakan Pendidikan berkualitas dalam mendukung SDGs yaitu bisa dilihat berdasarkan laporan rencana aksi daerah salah satunya yaitu jawa barat dan jawa timur yaitu diantaranya: Meningkatkan kesempatan belajar belajar sepanjang hayat untuk semua kalangan tanpa di pungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada pencapaian pembelajaran yang efektif dan relevan.

Sementara berdasarkan laporan rencana aksi area tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam rangka mendukung pencapaiannya SDGs telah disusun oleh pemerintah daerah Jawa Timur beberapa target diantaranya: 1). Pelayanan Dasar yang bermutu, yakni pendidikan dan kesehatan bermutu dan bebas biaya (Gratis dan Berkualitas) dengan perluasan cakupan bantuan siswa miskin, pembiayaan pendidikan, dana

insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK, SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata). Penguatan BOSDA MADIN, bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah. Memberikan akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak nelayan, petani, buruh, serta yatim yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A SUSTAINABLE AND RESILIENT SINGAPORE TOWARDS Singapore's Voluntary National Review Report to the 2018 UN High-Level Political Forum on Sustainable Development.* (2018). www.mfa.gov.sg
- 'Annur, Wati, Mahtari, & Prastika. (2018). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Seminar Nasional Pendidikan*. <http://snpfmotogpe.ulm.ac.id/proceeding/index.php/snpf/article/view/16>
- azhari, K. (2016). 77739-ID-manajemen-pembiayaan-pendidikan-fasilita. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/5631>
- Bolton, M. (2021). Public sector understanding of sustainable development and the sustainable development goals: A case study of Victoria, Australia. *Current Research in Environmental Sustainability*, 3. <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100056>
- Brunei Hand, G., Brunei La Vida Sdn Bhd, H., & Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, P. (n.d.). *Brunei Council on Social Welfare Brunei Darussalam AIDS Council Brunei Darussalam National Association of the Blind Brunei Darussalam Youth Council Brunei Malay Chamber of Commerce and Industry Chinese Chamber of Commerce in Brunei Darussalam Council for the Welfare of Persons with Different Abilities Down Syndrome Association*. www.mofe.gov.bn
- Dewi, R. (2016). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 7, Issue 2). Oktober. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/6293>
- Efendi. (2016). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK*. STAIN Ponorogo.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>
- Gubernur, P., & Timur, J. (n.d.). *GOVERNOR JAWA TIMUR*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Hakim, L. (2016). PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI RAKYAT SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Jurnal EduTech*, 2(1). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>
- Junaid. (2016). 1380-Article Text-2836-1-10-20160922. *Sulesana*, 7(2). <http://repository.poltekparmakassar.ac.id/123/1/Analisis%20data%20Ilham%20Junaid.pdf>

- Maki, H. A., Gunawan, G., Sauri, S., & Handayani, S. (2022). Pola Hubungan Kebijakan Dan Pembangunan Pendidikan Dan Kebudayaan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1124. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1023>
- Mokshein, S. E. (2019, July 22). *Education for Sustainable Development (ESD) in Malaysia: Policy, Program and Evaluation*. <https://doi.org/10.2991/iccie-18.2019.2>
- Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Panuluh Meila Riskia Fitri, S. (2015). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. www.infid.org
- Pradnyana. (2022). *Pendidikan Karakter Penting di Era Pandemi Covid-19 (Penguatan Pendidikan Karakter Mempersiapkan Mahasiswa Tutor Sebaya di Lingkungan Keluarga dan Skaa Taruna)*. Surya Dewata.
- Qadir Muslim, A., Gede Sedana Suci, I., Rizki Pratama, M., & Bagus Sugriwa Denpasar, G. (n.d.). *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JEPANG, FINLANDIA, CHINA DAN INDONESIA DALAM Mendukung Sustainable Development Goals*. <http://ejournal.ihtn.ac.id/index.php/AW>
- RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. (n.d.). <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Salam, A., Hamdu, G., & Nur, L. (2022). *PEDADIDAKTIKA: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Penerapan Education for Sustainable Development (ESD) dalam Media Pembelajaran Elektronik di Kelas V Sekolah Dasar: Perspektif Guru* (Vol. 9, Issue 1). <http://ejournal.upi.edu/index.php/pedadidaktika/index>
- Sukardi, E., Jennifer, G., & Kwang, V. C. (2022). Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12427>
- Trianto. (2011). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Kencana .